



REGISTRASI SOSIAL EKONOMI

BPS Yogya Sasar 129.922 Keluarga

YOGYA (MERAPI) - Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta melakukan registrasi sosial ekonomi untuk perbaikan data program perlindungan sosial dengan metode sensus yang menasar 129.922 keluarga di kota tersebut.

"Kami akan melakukan sensus door to door dengan sasaran keluarga di Kota Yogyakarta. Nantinya, akan ada petugas yang datang langsung ke warga untuk melakukan pendataan," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta Mainil Asni di Balai Kota, Selasa (12/10).

Registrasi sosial ekonomi tersebut akan dilakukan selama sekitar satu bulan, dimulai pada 15 Oktober-14 November.

Mainil berharap warga memberikan jawaban atau data sesuai kondisi yang sebenarnya



Mainil Asni

karena data tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan khususnya untuk program perlindungan sosial.

Variabel pendataan dalam registrasi sosial ekonomi tersebut di antaranya meliputi data

kependudukan dan ketenagakerjaan, perlindungan sosial, perumahan, pendidikan, kesehatan dan disabilitas, serta pemberdayaan ekonomi.

BPS Kota Yogyakarta mengerahkan sebanyak 652 petugas dalam penyelenggaraan registrasi sosial ekonomi tersebut.

"Dimungkinkan, jumlah keluarga sasaran dalam program registrasi ini akan bertambah karena kami akan mendata seluruh keluarga yang berdomisili di Kota Yogyakarta," katanya dilansir dari Antara.

Meskipun keluarga tersebut tidak tercatat sebagai warga Kota Yogyakarta atau memiliki Kartu Keluarga (KK) dari luar daerah namun berdomisili di Kota Yogyakarta, maka akan masuk dalam pendataan.

Begitu pula dengan pelaj

jar atau mahasiswa dari luar daerah yang sudah berusia 17 tahun dan saat ini tinggal di Kota Yogyakarta, juga akan menjadi sasaran registrasi sosial ekonomi. "Sedangkan bagi pelajar dari luar daerah yang berusia kurang dari 17 tahun, tidak akan menjadi sasaran pendataan," ujarnya.

Selain itu, petugas juga akan melakukan pendataan terhadap warga tunawisma yang tidak memiliki tempat tinggal tetap. "Kami rencanakan pada

akhir Oktober akan melakukan pendataan kepada tuna wisma dan lainnya," katanya.

Mainil mengatakan, perbaikan basis data penerima program perlindungan sosial sangat dibutuhkan sebagai pemutakhiran dan penyempurnaan data. Data yang digunakan untuk program perlindungan sosial, yaitu 40 persen keluarga di Indonesia yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial adalah hasil pendataan pada 2015. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPS	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005